

# REFUNGSIONALISASI KEBIJAKAN UNTUK PENINGKATAN PERAN KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM JABATAN BIROKRASI PEMERINTAHAN DI KABUPATEN JAYAPURA

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis refungsionalisasi kebijakan dalam meningkatkan peran Kepemimpinan Perempuan dalam Jabatan Birokrasi Pemerintah Kabupaten Jayapura. Oleh karena itu dalam penelitian ini memiliki 3 fokus kajian utama, *pertama* Menganalisis gambaran peran kepemimpinan perempuan dalam Jabatan Birokrasi Pemerintah di Kabupaten Jayapura. *Kedua* Menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi peran kepemimpinan perempuan dalam Jabatan Birokrasi Pemerintah di Kabupaten Jayapura. *Ketiga*, Merumuskan Upaya refungsionalisasi kebijakan dalam meningkatkan peran kepemimpinan perempuan dalam Jabatan Birokrasi Pemerintah di Kabupaten Jayapura. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di Kabupaten Jayapura. Teknik penentuan informan dipilih secara *purposive*. Pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara mendalam, Observasi, dan FGD. Teknik analisis data meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, interpretasi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Pertama*, peranan kepemimpinan perempuan dalam jabatan birokrasi pada kabupaten Jayapura dinilai mampu menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan baik. model kepemimpinan yang ditunjukkan adalah kepemimpinan yang demokratis yang mengutamakan dialog dan musyawarah mufakat sebagai model dalam pengambilan keputusan dari hasil koordinasi dan komunikasi. Peran pada aspek managerial seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pembinaan hingga pengawasan dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang persuasif tetapi tetap disiplin dan profesional. Pemberian motivasi dan insentif penghargaan dan sanksi juga merupakan strategi yang dikembangkan para pemimpin dalam meningkatkan perannya untuk menggerakkan bawahan. *Kedua*, faktor determinasi pendukung dan penghambat meliputi dukungan dalam bentuk regulasi, dukungan struktural dan dukungan sosial-budaya. *Ketiga*, Refungsionalisasi kebijakan publik yang berbasis gender pada pemerintah kabupaten sebagai alternatif dilakukan melalui dua pilihan langkah, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik yang berbasis pengarusutamaan gender. Serangkaian investigasi penulis dalam implementasi kebijakan dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan yang sesuai dengan manajemen sektor publik menunjukkan bahwa terdapat kelemahan dalam hal politik penentuan jabatan tertentu yang dilakukan secara tertutup sehingga mengabaikan peran pengarusutamaan gender.

*Kata Kunci: Refungsionalisasi Kebijakan, Peran, Kepemimpinan, Perempuan, Kabupaten Jayapura, Papua.*

